

Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa

Heri Gazali (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: herigazali@yahoo.com

Abstract

Purpose of this writing is: 1) to know executable accomplishment PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency; (2) to know the benefit of PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency. This research be held less more 3 weeks and be located in Salumaka village. Result of the research showing that : (1) accomplishment of the main road manufacture village with concrete pavement rebates have done and helping people in agricultural marketing. (2) The main road of the village must be treated to order can be long lasting and useful for the people in daily activity.

Keywords: PNPM, Execution, Mamasa city

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah : (1) untuk mengetahui pencapaian hasil pelaksanaan program PNPM Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa ; (2) untuk mengetahui manfaat program PNPM Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 minggu dan berlokasi di Desa Salumaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pencapaian pembuatan jalan poros desa dengan perkerasan rabat beton telah terselesaikan dan membantu masyarakat dalam hal pemasaran hasil pertanian (2) jalan pros desa harus dijaga kondisinya agar bisa bertahan lama agar bermanfaat bagi masyarakat dalam pelaksanaa kegiatan sehari-hari

Kata kunci: PNPM, Pelaksanaan, Kota Mamasa.

PENDAHULUAN

Di dalam suatu negara kesejahteraan merupakan salah satu faktor penting dalam tercapainya suatu bentuk negara yang ideal. Namun, Hal itu terkadang sangat sulit direalisasikan. Hal itu disebabkan oleh tingginya tingkat kemiskinan yang terkadang menjadi batu sandungan bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya mengatasi pembangunan khususnya kemiskinan pada hakikatnya telah lama dilaksanakan pemerintah Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari visi pemerintah daerah yang berusaha menciptakan suasana yang memungkinkan bagi rakyat untuk berusaha dan membangun

dirinya agar tercipta kesejahteraan masyarakat. Beragam program dan kebijakan telah dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia, baik melalui pemerintah pusat seperti : Program Pemberdayaan Daerah akibat krisis ekonomi (PDM-DKE), Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Bantuan langsung Masyarakat (BLM) serta program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh daerah. Namun pada kenyataannya program dan kebijakan tersebut belum banyak merubah kondisi (kehidupan masyarakat) Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada data statistik mengenai jumlah penduduk miskin di Indo-

nesia yang dikeluarkan oleh BPS sebesar 36,1 juta jiwa atau sekitar 16,66 persen (BPS, 2004)

Sebuah studi tentang kemiskinan mengemukakan sebuah kesimpulan menarik mengenai mengapa berbagai program pemerintah tidak mengubah kondisi kemiskinan yaitu banyaknya penduduk yang membutuhkan bantuan tetapi tidak tersentuh, sebab penentuan kelompok sasaran program pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kepentingan aparat pelaksana, sehingga yang paling membutuhkan bantuan sering terpinggirkan. Data tersedia pada umumnya hanya menjelaskan indikasi program-program yang telah dan akan dilaksanakan tidak dapat mengungkapkan efektifitas penggunaan dalam mengatasi kemiskinan di daerah atau dalam suatu kelompok masyarakat tertentu serta berapa banyak penduduk miskin yang telah diangkat derajat hidupnya melalui program tersebut. Hal tersebut menunjukkan secara umum masih banyaknya masalah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa yang menjadi dasar tujuan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah untuk: (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Intinya adalah keterlindungan, kesejahteraan, dan kecerdasan masyarakat haruslah tersalurkan secara adil. Keempat hal diatas merupakan acuan dasar penggambaran perencanaan pembangunan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan.

Permasalahan pembangunan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Untuk itu diperlukan perubahan yang menyeluruh dalam

upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan utamanya kemiskinan.

Oleh karena itu, Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Melihat kesejahteraan sosial Indonesia, sudah semestinya jika para Pemimpin/Pemerintah pembuat kebijakan, dan siapa saja yang tergerak membangun Indonesia untuk menengok kembali dan memperkuat konsep manajemen berdasarkan tujuan bernegara untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Negara tercinta ini. Adapun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 3 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sbagai berikut: 1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; 4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia, sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya kesejahteraan serta kemandirian masyarakat yang berkelanjutan yang adil dan makmur, Sebagai mana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (4) "Perekonomian nasional diselenggarakan

berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan dipertegas pada Pasal 34 Ayat (2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Amandemen IV). Ini berarti, kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan platform system perekonomian dan system kesejahteraan sosial di Indonesia.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri.

Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa.

Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa merupakan sebuah kondisi sosial sebuah negara sebagaimana yang diketahui bahwa masyarakat desa merupakan komponen dan bagian dari masyarakat Indonesia.

Salah satu sasaran pokok dengan adanya PNPM mandiri ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana kemudian meningkatkan mutu sebuah desa/kelurahan. Dengan adanya program PNPM mandiri yaitu „, “Pembuatan jalan poros desa

dengan perkerasan rabat beton” yang sudah di jalankan oleh pemerintah desa salumaka dan panitia penyelenggara PNPM mandiri dimana merupakan salah satu poin penting dalam proses perekonomian masyarakat atau dengan kata lain lancarnya jalan desa dapat membantu kelancaran perekonomian masyarakat dan pada akhirnya salah satu tujuan pemerintah yaitu menciptakan kesejahteraan (welfare) dapat terwujud, dari latar belakang penelitian yang ada membuat penulis tertarik untuk meneliti kehadiran PNPM mandiri di desa salumaka sudah berorientasi pada masyarakat miskin dan apakah program PNPM yang ada sudah bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Desa Salumaka Kecamatan Mambi

METODE PENELITIAN

Metode yang penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen- dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang di teliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian tentang evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa. maka peneliti dapat memberikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan. Deskripsi hasil penelitian adalah sebagai berikut: A. Hasil Yang Dicapai Dalam Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program PNPM mandiri adalah merupakan hasil yang dicapai dalam melaksanakan program nasional yang sesuai dengan visi dan misi pengurus PNPM Mandiri itu sendiri yang hanya untuk demi kemaslahatan masyarakat dan merealisasikan rencana kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini hasil pencapaian PNPM Mandiri akan di lihat dalam tiga indikator yaitu : 1. Penanggulangan kemiskinan melalui pembuatan jalan poros desa dengan perkerasan rabat beton. 2. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui program pembuatan jalan poros desa dengan perkerasan rabat beton. B. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pembuatan Jalan Poros Desa dengan Perkerasan Rabat Beton merupakan salah satu Desa swasembada yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian yaitu sebanyak 3.21 orang dan sebagian besarnya lagi bekerja sebagai buruh harian atau tukang, 10 orang bekerja di sektor peternakan dan di desa ini tidak memiliki penduduk yang bekerja sebagai pengusaha. Berikut data angkatan kerja di desa Salumaka tahun 2014.

Dari tabel diatas di deskripsikan bahwa program PNPM mandiri yaitu pembuatan jalan poros desa dengan perkerasan rabat beton memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan angkatan kerja Desa Salumaka. Masyarakat yang bekerja sebagai sopir mobil yang dulunya hanya 1 orang sampai 3 orang.

Program ini juga memberikan pengaruh signifikan terhadap tukang ojek yang sudah ada 12 orang sebagai tukang ojek dari yang sebelumnya tidak ada dan kemudian tenaga honorer dari desa ke dinas meningkat. Program PNPM mandiri yaitu pembuatan jalan poros desa dengan perkerasan rabat beton tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan angkatan kerja tetapi juga kepada pendapatan masyarakat. Berdasarkan data diatas dideskripsikan bahwa masyarakat

yang berpendapatan 0-Rp.500.000 menurun jika di bandingkan tahun 2014. Di tahun 2014 mencapai angka 8 % dan sekarang hanya 5 %. Masyarakat juga yang rata-rata berpenghasilan sekitar Rp. 500.000- Rp. 1.000.000 menurun dari tahun 2014 mencapai angka 68% dan di tahun 2014 hanya 58% artinya penurunannya mencapai angka 10 %. Peningkatan pendapatan terjadi bagi masyarakat yang memiliki pendapatan dai rata-rata Rp. 1.000.000 - Rp.2.000.000 dari 23% menjadi 27% meningkat 4 %. Peningkatan pendapatan masyarakat tahun 2016 ini berdasarkan data dan hasil wawancara dideskripsikan karena terealisasinya program PNPM mandiri yaitu pembuatan jalan poros desa dengan perkerasan rabat beton di desa Salumaka Peningkatan pendapatan ini terjadi karena akses jalan sudah memadai dan retribusi pangan dari desa ke kota sudah berjalan dengan baik, petani sudah memasarkan hasil taninya di luar desa serta kegiatan ekonomi tidak lagi hanya bertujuan untuk pemenuhan hidup semata tetapi juga untuk kepentingan bisnis, hal ini terbukti dari adanya warga yang menjadi pedagang beras dan sayur-sayuran di desa Salumaka. Pabrik berjalan juga untuk penggilingan padi sudah masuk di desa salumaka dan pabrik tersebut selain menggiling padi juga biasanya membeli beras dari warga. C. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Melalui Program Pembuatan Jalan Poros Desa dengan Perkerasan Rabat Beton. Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata "empowerment", yang berarti memberi daya, memberi "power" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Mengacu dari Ife (1997) pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan memberikan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat miskin untuk ikut terlibat dalam proses pelaksanaan terkait dengan program PNPM MANDIRI dengan pembuatan jalan

poros desa dengan perkerasan rabat beton baik secara individu maupun kelompok. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan jalan poros desa dengan perkerasan rapat beton, baik dalam pengambilan keputusan maupun ketika masuk dalam tahap pengerjaan fisik. Masyarakat menganggap program ini adalah persoalan fundamental yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Keterlibatan masyarakat ada yang terlibat sebagai perorangan dan ada juga yang membentuk kelompok kerja dalam musyawarah dari setiap program PNPM mandiri sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Mastar selaku sekretaris PNPM Mandiri : “ Dalam pemberdayaan masyarakat membentuk beberapa kelompok kerja untuk memudahkan pekerjaan dengan cara melalui musyawarah di tingkat dusun”. wawacara 23 maret 2016 Kelompok kerja masyarakat terbagi berdasarkan dusun. Desa Salumaka memiliki enam dusun itu artinya juga memiliki enam kelompok kerja. Kelompok kerja dusun Bulu di ketuai oleh Bapak Hengki, kelompok kerja dusun Kampung Tanete ketuanya adalah Halidung, kelompok kerja dari dusun Batu Lakka diketuai oleh Basri, sementara Bapak Rusdin sebagai ketua kelompok kerja dari dusun Marga, sedangkan Bapak Yusuf ketua kelompok kerja dari dusun Kokbon dan kelompok kerja dusun Kampung tua di ketuai oleh Daeng Mappajung.

Tujuan dari dibentuknya kelompok kerja ini adalah agar dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengelola, dan mengawasi jalannya program tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Mastar : “ Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri melibatkan seluruh elemen masyarakat Salumaka baik secara swadaya dan upah harian” wawancara 23 maret 2016 Senada yang dikemukakan oleh bapak Nasaruddin Ketua PNPM Mandiri di Desa

Salumaka : “Cara pemberdayaan masyarakat di Desa Salumaka mempekerjakan seluruh masyarakat pada saat pelaksanaan program PNPM Mandiri” wawancara 25 maret 2016mLebih lanjut Bapak Abdul Rahman Safei sebagai toko Agama di desa Salumaka yang mengemukakan bahwa :“Pemberdayaan masyarakat dilakukan dari seluruh Lini dan tentunya sangat baik karena setiap kegiatan, masyarakat diberikan wewenang dan fungsi masing-masing sesuai bakat dan kemampuannya” wawancara 25 maret 2016 D. Manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Manfaat program nasional masyarakat mandiri di Desa Salumaka dengan mengumpulkan berbagai macam data termasuk data dari hasil wawancara terhadap beberapa informan yang sudah di tentukan sebagai mana yang di jelaskan dalam bab sebelumnya tentang informan dalam penelitian ini, maka penulis dapat memberikan gambaran dan penjelasan tentang manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari hari dengan memudahkan kinerja mereka dengan terciptanya jalan beton dan jalan untuk menuju perkebunan, juga sudah dengan mudah membawa hasil pertanian mereka ke pasaran.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka juga telah member kesadaran kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan program-program yang berguna untuk kepentingan bersama. termasuk program-program pemerintah. Hadirnya PNPM Mandiri di Desa Salumaka sangat banyak membantu dan memberikan perubahan dalam kehidupam ekonomi masyarakat Desa Salumaka dimana mereka sudah bisa membawa keluar hasil-hasil

Taninya ke pasaran, karena jalan yang di lewati sudah bisa di lalui kendaraan seperti motor.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri sudah cukup menanggulangi kemiskinan dan dapat meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat yang ada di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara dengan bapak. Perbaikan jalan poros Desa dengan perkerasan Rabat beton juga sangatlah membantu masyarakat dalam hal akses jalan untuk membawa hasil pertanian ke pasar untuk diperjualbelikan guna untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa. Manfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa sangat banyak membantu dan memberikan perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat Desa Salumaka Kabupaten Mamasa dimana mereka sudah bisa menjual hasil pertanian mereka ke pasar karena jalan yang sudah dapat di lalui dengan kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharto Edi, *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*, Bandung, CV. Alfabeta. (2009).
- Suharto Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, (2007).
- Ginjar Karta Sasmita, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, bappenas, (1996).
- Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Adi, Isbandi Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, PT Gramedia, (2012)

Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia ke 3*, Jakarta, Galih, Indonesia

standar garis kemiskinan (2015), diakses pada tanggal 28 september melalui [http://www.BadanPusatStatistik\(BPS\)](http://www.BadanPusatStatistik(BPS))

(2015) diakses pada tanggal 28 september melalui <http://simpadu-pnpm-bappenas.go.id>